

CM
4/3/2025

ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Nadia Nur Fitriani, Aufarul Marom

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Banjarpanepen Village is a tourist village in Banyumas Regency that has been developed since 2013. The main objective of this development is to enhance local community welfare through the sustainable use of local potential. However, progress in developing the Banjarpanepen Tourism Village has stagnated, and it remains classified as a village experiencing extreme poverty. Therefore, this study aims to analyze community empowerment in managing the Banjarpanepen Tourism Village, focusing on the processes and factors influencing empowerment efforts. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as participant observation, interviews, documentation, and literature studies. The findings indicate that community empowerment in the Banjarpanepen Tourism Village has not yet reached its full potential. This is evident in each stage of the empowerment process, from awareness, capacity building, to actual empowerment, where several obstacles persist. Factors influencing community empowerment in Banjarpanepen include internal aspects, such as community awareness, potential, skills, and social capital, as well as external factors, including government policies, facilitator roles, and access to resources. Based on these findings, recommendations include developing a roadmap for empowerment, strengthening management capacity and synergy, and expanding collaboration networks with external stakeholders.

Keywords: *Community Empowerment, Tourism Village, Sustainability*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia secara tekun berusaha memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 guna mengembalikan vitalitasnya agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pemulihan dan pembangunan sektor pariwisata menjadi

sangat krusial, mengingat sektor ini memberikan sumbangan pendapatan devisa signifikan bagi Indonesia dan menjadi penggerak utama perekonomian karena mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru serta mendorong ekspansi dan minat investor di sektor perjalanan dan pariwisata (Nawang Sari & Rahmatin, 2022).

Salah satu tren yang saat ini tengah berkembang dalam sektor pariwisata adalah desa wisata. Desa wisata merupakan konsep wisata yang memanfaatkan potensi lokal, baik alam, budaya, maupun sumber daya manusia, untuk menarik wisatawan dan menggerakkan perekonomian desa dengan kearifan masyarakat lokal. Pertumbuhan desa wisata di Indonesia terjadi sangat cepat dan hampir menjangkau setiap provinsi. Salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang tengah berusaha membangun desa wisata yakni Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh.

Banjarpanepen merupakan desa dengan potensi yang melimpah, baik dari segi kekayaan alam maupun dari budayanya. Pengembangan potensi wisata di Banjarpanepen dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini yakni peningkatan kemampuan ekonomi. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2023, Desa Banjarpanepen masih termasuk ke dalam salah satu desa dengan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sumpiuh. Selain itu, meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2013 dan kunjungan wisatawan ke beberapa destinasi wisata di Desa Banjarpanepen yang menunjukkan tren positif, Banjarpanepen masih tergolong sebagai desa wisata dalam kategori rintisan.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Desa Banjarpanepen

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan		
	2021	2022	2023
Taman Wisata Sentana	11.238	16.684	27.396
Bukit Pengaritan	2.703	9.400	14.395
Jumlah	13.941	26.048	41.791

Sumber: Diskominfo Banyumas, (2024).

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, desa wisata seharusnya tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang dikelola secara komersial, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat miskin. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan potensi desa wisata, baik dalam hal manajemen, pemasaran, pelayanan wisata, hingga pengelolaan sumber daya alam. Tanpa pemberdayaan yang cukup, masyarakat akan kesulitan dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Permasalahan inilah yang kemudian muncul dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen. Masyarakat, khususnya pihak pengelola masih mengalami keterbatasan dalam promosi. Kegiatan promosi melalui media sosial tidak lagi secara aktif dilaksanakan sejak terakhir pada tahun 2019.

Permasalahan lain juga muncul dalam aspek kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan. Desa Wisata Banjarpanepen perlu memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menjaga kelestarian alam dan budaya, serta bagaimana mengelola potensi wisata yang ada dengan bijaksana. Hal ini berkaitan dengan permasalahan kondisi fasilitas wisata yang tidak terkelola dengan baik. Infrastruktur yang seharusnya mendukung kenyamanan wisatawan, seperti gazebo, tempat parkir, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya, sering kali kurang terawat atau bahkan terbengkalai. Minimnya pengelolaan fasilitas ini tidak terlepas dari kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perawatan dan pengelolaan berkelanjutan.



Gambar 1. Fasilitas Pendukung Wisata yang Terbengkalai

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Proses pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan yang baik, serta memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam aspek-aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan fasilitas wisata, serta pengembangan budaya lokal. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen harus diatasi dengan baik sehingga keberadaan program desa wisata ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan Desa Banjarpanepen dari kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, studi ini akan menelisik lebih dalam terkait proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat dilakukan perbaikan.

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan sebagai proses kerja sama dari sekelompok orang (Pasolong, 2019) untuk melakukan pengendalian atas berbagai usaha dan urusan instansi pemerintah agar tujuannya tercapai (Y. Wayong, 2004) dengan proses

pengorganisasian sumber daya dan personil public yang dikoordinasikan untuk melaksanakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan pengelolaan berbagai masalah dan kebijakan publik (Chandler & Plano, 1988).

B. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan konsep yang berasal dari istilah “manajemen” dan “publik”. Menurut Stoner sebagaimana dikutip dalam Handoko (2016) manajemen diartikan sebagai proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas individu dalam suatu organisasi, serta alokasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun manajemen publik menggabungkan kata "manajemen" dan "publik" untuk menggambarkan seni sekaligus ilmu, yang dipraktikkan secara sistematis, logis, dan metodis dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, agar menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Nugroho, 2017).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu komponen pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah pemberdayaan. Sumaryadi dalam (Hannaji et al., 2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu

upaya untuk mempersiapkan masyarakat sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan bertahap agar dapat meningkatkan efektivitas dan signifikansi dari pemanfaatan obyek yang diberdayakan. Menurut Dwidjowiyoto dan Wrihatnolo (2007), tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Kesadaran

Pada tahap ini, subjek pemberdayaan, yaitu masyarakat, diberi pemahaman dan motivasi atas potensi yang dimiliki untuk mengembangkan diri.

2. Tahap Penguatan Kapasitas

Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang yang diberikan. Proses peningkatan kapasitas mencakup tiga bidang utama meliputi individu, organisasi, dan sistem nilai.

3. Tahap Pemberdayaan

Masyarakat diberi kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data primer untuk penelitian ini diperoleh langsung dan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan individu yang bertindak sebagai informan kunci yakni Kelompok Sadar Wisata Gunung Mas. Sementara itu, sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain bersumber dari undang-undang, artikel, jurnal serta buku yang terkait dengan isu-isu penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data menggunakan metodologi analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014) meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Desa Wisata Banjarpanepen

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini bertujuan agar penduduk lokal memiliki peran aktif dan menjadi pelaku utama dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata tersebut. Pemberdayaan masyarakat ini melibatkan

peningkatan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Adapun untuk menguraikan proses dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen, penulis menggunakan pendapat Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:3-6) dengan tiga tahapan sebagai berikut.

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena menentukan sejauh mana masyarakat dapat memahami, menerima, dan terlibat dalam pembangunan desa wisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019, pembangunan desa wisata harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, di mana mereka memiliki kewajiban untuk mendukung program tersebut sekaligus memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari keberadaan desa wisata. Oleh karena itu, tahap penyadaran dalam pemberdayaan desa wisata berkaitan dengan bagaimana masyarakat diberikan informasi mengenai potensi yang dimiliki desa, manfaat yang dapat diperoleh, serta peran yang dapat mereka jalankan dalam pengelolaan desa wisata. Tahap awal penyadaran ini ditandai dengan dilaksanakannya rapat awal atau

musyawarah rencana pembangunan desa wisata untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki Desa Banjarpanepen dalam pengembangan wisata.



Gambar 2. Musyawarah Inisiasi Perencanaan Desa Wisata Banjarpanepen
Sumber: Website Desa Banjarpanepen

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh Desa Banjarpanepen merupakan salah satu fondasi dasar yang melatarbelakangi terciptanya gagasan pembentukan desa wisata. Artinya bahwa masyarakat telah mengidentifikasi potensi yang mereka miliki dan mengetahui potensi apa yang layak dikembangkan untuk mewujudkan desa wisata. Akan tetapi, kesadaran akan potensi yang dimiliki tidak diikuti dengan dorongan keinginan untuk ikut berperan di dalam pengembangan desa wisata tersebut.

Salah satu penyebab munculnya permasalahan ini karena sosialisasi yang memegang peran kunci untuk menggalang partisipasi warga dalam pemberdayaan belum berhasil dilaksanakan secara maksimal. Pendekatan sosialisasi yang

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen adalah dengan metode penyebaran informasi yang masih mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut dimana efektivitasnya sangat terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang mengetahui detail kegiatan pemberdayaan atau bahkan tidak menyadari adanya program yang berjalan di desa mereka. Hal inilah yang kemudian juga mempengaruhi aspek keinginan masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan.

Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Gunung Mas menjadi momentum penting yang menandai awal gerakan pengelolaan wisata secara terstruktur di Banjarpanepen sekaligus menjadi pertanda bahwa telah terdapat keinginan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan potensi wisata yang dimiliki. Keinginan partisipasi dalam pengelolaan wisata ini juga memunculkan kelompok-kelompok masyarakat lain, yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Banjarpanepen yang mengembangkan dan mengelola destinasi wisata di Bukit Pangaritan.

Masyarakat juga ikut serta terlibat dalam mendukung penyelenggaraan wisata, mulai dari membuka umkm, hingga mendukung pelaksanaan event-event tertentu yang diselenggarakan di Desa Wisata Banjarpanepen. Namun, kesadaran

terhadap potensi wisata masih belum merata di antara masyarakat. Hanya kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata yang menunjukkan tingkat keterlibatan lebih tinggi, sementara masyarakat yang berada di area lain cenderung kurang memahami atau bahkan belum mengetahui bagaimana mereka dapat turut serta dalam pengelolaan desa wisata.

Tahap Pengkapasitasan

Pergub Jateng No. 53 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengembangan desa wisata melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pergub ini mengarahkan agar pengembangan desa wisata tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau promosi wisata semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat setempat yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Dalam hal ini, telah terdapat upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen, mulai dari berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan, seperti pelatihan ecoprint, tata boga, pemandu wisata, pengelolaan homestay, dll. Pengkapasitasan tersebut merupakan

langkah krusial yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa.



Gambar 3. Pelatihan Tata Boga
Sumber: Website Desa Banjarpanepen

Sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa wisata, Pergub No. 53 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas organisasi melalui pembinaan kelembagaan. Pembinaan kelembagaan atau organisasi pengelola wisata di Desa Banjarpanepen dilakukan melalui berbagai pelatihan meliputi aspek manajerial hingga tata kelola dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan desa wisata. Pelatihan maupun pembinaan ini dilaksanakan melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas hingga melalui Forum Komunikasi Pokdarwis Se-Jawa Tengah. Akan tetapi, dalam peningkatan kapasitas organisasi pengelola dan pemberdaya Desa Wisata Banjarpanepen,

upaya pembinaan tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh mengingat masih terbatasnya jumlah pelatihan bagi organisasi pengelola dan masih adanya organisasi yang justru sama sekali belum mendapatkan pembinaan.

Peningkatan kapasitas juga harus dilaksanakan untuk membentuk pola pikir, sikap, dan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya pengkapasitasan nilai melalui pembentukan aturan bersama sebagai proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan, memperkuat rasa memiliki, dan membangun komitmen kolektif di antara masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan. Namun, dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarpanepen, tidak ada aturan yang disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap organisasi atau kelompok yang berperan dalam pemberdayaan cenderung menjalankan program sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai internal masing-masing, tanpa adanya koordinasi yang menyeluruh.

Arah pengelolaan dan pengembangan desa wisata diserahkan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Pokdarwis Gunung Mas memiliki agenda kerja yang difokuskan pada pengelolaan wisata seperti Kali Cawang dan destinasi

lain di Desa Banjarpanepen. Sementara itu, LMDH Banjarpanepen berfokus pada pengelolaan Bukit Pangaritan, Watu Jonggol dan sumber daya hutan yang ada. Namun, ketiadaan aturan atau pedoman bersama membuat masing-masing organisasi ini bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang kuat. Tanpa adanya aturan yang jelas, masyarakat yang telah diberi tanggung jawab juga menghadapi kebingungan dalam menentukan prioritas, membagi peran, atau mengelola sumber daya wisata.

Ketiga tahap pengkapasitasan ini seharusnya berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang optimal. Namun, di Desa Banjarpanepen, implementasi ketiga tahap ini masih berjalan secara parsial. Contohnya, meskipun masyarakat telah mendapatkan pelatihan, jika tidak didukung oleh organisasi yang kuat dan aturan yang jelas, maka hasil pelatihan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, keseluruhan kondisi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada masyarakat dan kebutuhan untuk menciptakan kerangka aturan yang dapat memandu pengelolaan wisata. Selain itu, pemberian pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan organisasi pengelola wisata juga menjadi hal yang penting. Dengan demikian,

masyarakat tidak hanya memiliki otonomi dalam pengelolaan wisata, tetapi juga dibekali kapasitas yang memadai untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu pilar pemberdayaan ekonomi desa.

Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diarahkan untuk memiliki kesadaran dan kemampuan memanfaatkan peluang serta sumber daya lokal. Keberjalanan program desa wisata di Desa Banjarpanepen menjadi salah satu aspek penting dalam tahap pendayaan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang telah dibekali dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan kemudian diberikan kesempatan agar mampu memanfaatkan potensi desa secara optimal, baik dari segi sumber daya alam, budaya, maupun tradisi yang khas. Kegiatan wisata di Desa Banjarpanepen dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, seperti Pokdarwis Gunung Mas dan LMDH Banjarpanepen, yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan potensi wisata dan sumber daya desa. Wewenang pengelolaan wisata Desa Banjarpanepen telah diserahkan kepada organisasi masyarakat. Namun, pelimpahan wewenang ini belum diiringi dengan kesiapan yang memadai. Organisasi pengelola belum memiliki

kapasitas yang cukup dalam mengelola desa wisata secara profesional, sehingga perkembangan sektor wisata berjalan lambat.

Hingga saat ini, pengelolaan wisata lebih banyak dijalankan sebagai upaya spontan oleh organisasi masyarakat tanpa adanya rencana bisnis yang jelas. Masalah ini kemudian berdampak pada pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen yang belum berorientasi pada profit dan menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan strategi ekonomi desa wisata. Pengelolaan tiket masuk, parkir maupun penjualan paket-paket wisata belum kembali dikelola dengan baik oleh organisasi-organisasi pengelola. Padahal kunjungan wisatawan masih tetap ada.

Skema kegiatan pemberdayaan tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus dirancang dengan visi keberlanjutan untuk memastikan bahwa dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dalam konteks Desa Banjarpanepen, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga ditujukan agar masyarakat dapat memiliki keterampilan baru sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Banyak masyarakat yang telah menunjukkan inisiatif dengan memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor pariwisata, seperti berjualan di sekitar area wisata atau membuka usaha kuliner. Namun, stabilitas

usaha-usaha ini masih menjadi tantangan besar. Hal ini terbukti dengan adanya pandemi Covid-19 yang menggoyahkan aktivitas tersebut sehingga banyak sektor usaha masyarakat yang terhambat bahkan berhenti total.

Pengembangan desa wisata harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, implementasi pemberdayaan di Desa Wisata Banjarpanepen, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan pada akhirnya tidak berkelanjutan. Misalnya, pelatihan batik ecoprint yang telah berhasil memproduksi dan memasarkan produk yang dihasilkan, namun kemudian terhenti setelah sekali produksi. Selain itu, terdapat juga pelatihan tata boga yang memberikan bantuan berupa alat masak telah membantu masyarakat memulai usaha kecil. Namun, keberlanjutan usaha tersebut masih menjadi tantangan, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan dalam akses pasar dan manajemen usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah memberikan dasar keterampilan, pendampingan lanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan peluang usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan yang matang diperlukan agar pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya sekadar

menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat dan sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Permasalahan-permasalahan di atas terjadi salah satunya berkaitan dengan keterbatasan pendanaan atau anggaran. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak lain, juga memiliki peran penting dalam tahap pendayaan ini. Dalam pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat Desa Banjarpanepen, telah terdapat berbagai macam bantuan seperti pembangunan infrastruktur wisata berupa gazebo, alat masak untuk pelatihan tata boga, hingga dukungan modal untuk kelompok pengelola gula. Namun, distribusi bantuan ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan. Misalnya, bantuan infrastruktur sering kali tidak diikuti oleh program pendukung lainnya, seperti promosi atau pembinaan intensif, sehingga hasilnya belum mampu memberikan dampak yang maksimal. Selain itu, pengembangan desa wisata membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara mekanisme untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga pendukung lainnya masih belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanepen dan organisasi masyarakat yang ada perlu

menyusun strategi yang lebih terencana. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan skema kemitraan atau CSR dengan perusahaan atau pihak yang memiliki program relevan. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi dengan sektor swasta dapat memberikan dampak signifikan dalam memberdayakan masyarakat Desa Banjarpanepen dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa wisata.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen

Faktor Internal

Terdapat tiga faktor internal yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan dan pengembangan desa wisata.

1. Keinginan dan Kesadaran Masyarakat

Keinginan dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Faktor ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berkomitmen terhadap program pemberdayaan yang ada. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa

Wisata Banjarpanepen, keinginan masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pengelolaan usaha, atau keterlibatan langsung dalam pengembangan objek wisata.

Adapun minat dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan wisata belum sepenuhnya berkembang secara merata di Desa Banjarpanepen. Meskipun sebagian masyarakat telah menunjukkan inisiatif dengan memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor pariwisata, seperti berjualan di sekitar kawasan wisata atau membuka usaha berbasis kuliner lokal, kesadaran kolektif untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan masih terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengelolaan wisata yang dicanangkan oleh organisasi desa, serta minimnya koordinasi antarwarga dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.

2. Potensi dan Kemampuan Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap potensi desa dan peran mereka dalam pengelolaannya menjadi landasan utama untuk membangun keterlibatan aktif dalam berbagai program pemberdayaan. Kesadaran ini kemudian perlu diimbangi dengan kemampuan yang memadai, baik

dari segi keterampilan teknis maupun kapasitas manajerial, agar masyarakat dapat secara optimal menjalankan perannya. Di Desa Banjarpanepen, masyarakat telah mulai menunjukkan kesadaran awal akan pentingnya pemberdayaan, yang terlihat dari partisipasi mereka dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak pemberdaya. Pelatihan-pelatihan ini menjadi langkah awal dalam membuka wawasan masyarakat tentang potensi ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

Kemampuan yang dihasilkan dari pelatihan mencakup keterampilan teknis seperti produksi ecoprint hingga tata boga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Walaupun demikian, kemampuan ini sering kali belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan yang lebih strategis sehingga banyak yang tidak berkelanjutan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan dalam pengelolaan wisata, baik di tingkat masyarakat maupun organisasi pengelola. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan dan pengkapsitan lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis masyarakat serta organisasi pengelola.

3. Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai yang dapat memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan daya saing mereka dalam mengelola sumber daya, termasuk dalam sektor pariwisata. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Banjarpanepen merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan dalam pemberdayaan dan pengelolaan desa wisata. Kekuatan hubungan sosial, rasa kebersamaan, serta jaringan kerjasama yang terjalin dengan baik di antara masyarakat merupakan penggerak pemberdayaan di Desa Banjarpanepen.



Gambar 4. Penetapan Desa Sadar Kerukunan Banjarpanepen

Salah satu bentuk nyata dari modal sosial ini adalah keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok pengelola wisata, kelompok seni dan budaya, serta kelompok usaha kecil dan menengah dalam penyelenggaraan event budaya dan wisata di Banjarpanepen.

Kerjasama ini menciptakan sinergi yang penting dalam pengelolaan destinasi wisata, di mana berbagai pihak saling mendukung dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam modal sosial masyarakat Banjarpanepen, seperti gotong royong dan saling membantu, menjadi dasar kuat untuk keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Dengan penguatan modal sosial melalui pelatihan, kolaborasi yang lebih baik antarorganisasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan, Desa Banjarpanepen dapat mengembangkan wisata yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan budaya di dalam komunitas tersebut.

Faktor Eksternal

Pemberdayaan masyarakat desa wisata tidak hanya bergantung pada faktor internal tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berperan dalam mendukung atau menghambat proses pemberdayaan. Faktor eksternal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Pemerintah

Keberadaan kebijakan pemerintah menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen. Pemerintah telah

memberikan dukungan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi desa. Kebijakan ini mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sumber daya, dan promosi pariwisata lokal hingga kebijakan alokasi bantuan anggaran pengembangan.

Kebijakan juga harus mencakup aspek-aspek yang lebih fundamental seperti penguatan organisasi masyarakat lokal dan pembentukan regulasi di tingkat desa. Namun dalam hal ini, Desa Banjarpanepen belum memiliki regulasi formal yang mengatur pengelolaan desa wisata secara terintegrasi, termasuk pembagian peran antar organisasi masyarakat, serta mekanisme pelibatan masyarakat atas kegiatan pemberdayaan dan pengembangan desa wisata. Ketiadaan regulasi ini membuat inisiatif pemberdayaan lebih banyak bergantung pada individu atau kelompok tertentu, sehingga sulit untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan membuka potensi konflik karena tidak adanya panduan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab antar pihak terlibat. Ketiadaan regulasi juga menyebabkan pengelolaan wisata di Desa Banjarpanepen cenderung berjalan tanpa arah yang terukur.

2. Peran Fasilitator dan Pemberdaya

Fasilitator dan pemberdaya, seperti pemerintah setempat, dinas-dinas terkait dan akademisi, telah banyak berkontribusi melalui pelatihan-pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti pengelolaan homestay, ecoprint, tata boga, dan pengelolaan usaha kecil. Selain itu, baik dari sektor pemerintah maupun akademisi, telah mendukung dengan memberikan akses terhadap pengetahuan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Proses pembangunan Desa Banjarpanepen sebagai desa wisata pun tidak dapat dipisahkan dari kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh fasilitator dan pemberdaya. Namun, perlu adanya peningkatan dalam kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut untuk menciptakan program-program yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan keterlibatan pihak-pihak eksternal, seperti akademisi, dinas-dinas terkait, atau organisasi non-pemerintah, biasanya berlangsung dalam waktu yang terbatas, seperti melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian lapangan, atau pelatihan singkat. Sementara skema monitoring dan evaluasi belum dirancang dan diimplementasikan dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan.

3. Ketersediaan Akses dan Sumber Daya

Ketersediaan akses dan sumber daya merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa Banjarpanepen. Salah satu contohnya adalah akses terhadap pelatihan dan pendidikan. Pelatihan-pelatihan yang telah diadakan telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru. Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan lanjutan atau mentoring intensif sering kali mengakibatkan keterampilan tersebut tidak diterapkan secara maksimal sehingga tenaga penggerak yang memiliki visi jangka panjang dan kemampuan dalam menyusun program-program strategis masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pendampingan lebih lanjut baik oleh fasilitator maupun pemberdaya sangat diperlukan untuk memastikan hasil pemberdayaan yang berkelanjutan.

Penyebab ketidakberlanjutan program pemberdayaan ini juga salah satunya diakibatkan akses terhadap modal usaha yang masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat Desa Banjarpanepen yang telah menunjukkan inisiatif dari hasil pelatihan dan pendidikan yang mereka peroleh dengan memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata, seperti berjualan di sekitar area wisata atau membuka usaha

tertentu. Namun, keterbatasan modal membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha tersebut ke tingkat yang lebih profesional dan berkelanjutan. Ketergantungan pada dana pribadi dan minimnya akses ke sumber pembiayaan eksternal, seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi hambatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat ini.

KESIMPULAN

Proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam setiap aspeknya.

1. Pada tahap penyadaran, pembangunan Desa Banjarpanepen sebagai desa wisata berasal dari inisiatif masyarakat setempat yang mencerminkan kesadaran kolektif terhadap potensi yang dimiliki. Namun, kurangnya kelanjutan sosialisasi mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang program ini menjadi terbatas dan tidak merata sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu dengan kesadaran manfaat potensi wisata yang masih perlu ditingkatkan.

2. Pada tahap pengkapasitasan, telah ada berbagai program pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah dan akademisi, tetapi keberlanjutan dan efektivitasnya masih menjadi tantangan. Rendahnya kapasitas manajerial dan kurangnya pendampingan secara berkelanjutan membuat keberjalanan organisasi pengelola wisata belum optimal. Selain itu, belum adanya regulasi internal yang mengatur peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa wisata menghambat koordinasi antarpihak yang terlibat.
3. Pada tahap pendayaan, keberjalanan program desa wisata masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan, terutama karena belum adanya kesiapan dari organisasi pengelola. Tingkat keberhasilan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha pun masih sangat bervariasi dan belum menunjukkan adanya keberlanjutan. Walaupun terdapat bantuan yang diberikan, pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen masih menghadapi kendala finansial.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

1. Berkaitan dengan faktor internal, keinginan dan kesadaran masyarakat sudah mulai muncul, namun belum menunjukkan pemerataan dan belum diikuti dengan kemampuan yang memadai, khususnya dalam pengelolaan wisata. Namun, modal sosial yang dimiliki menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.
2. Adapun dalam faktor eksternal, dukungan kebijakan pemerintah belum ditindaklanjuti dengan pembentukan regulasi pengelolaan desa wisata Banjarpanepen yang terintegrasi. Selain itu, fasilitator dan pemberdaya belum memiliki skema monitoring dan evaluasi. Sementara itu, ketersediaan akses masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada akses pendampingan berkelanjutan dan akses kolaborasi dengan pihak eksternal dalam skema pendanaan seperti CSR atau kemitraan dengan sektor swasta masih belum tereksplorasi dengan baik.

SARAN

1. Pemerintah bersama dengan organisasi pengelola dan masyarakat Desa Banjarpanepen diharapkan dapat menyusun panduan atau roadmap pengembangan desa wisata yang terintegrasi sebagai arah dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.
2. Pemerintah dan organisasi pengelola diharapkan melakukan pendekatan yang lebih strategis dalam aspek sosialisasi.
3. Fasilitator dan pemberdaya diharapkan dapat merancang program peningkatan kapasitas yang lebih strategis dan berkesinambungan dengan adanya skema monitoring dan evaluasi.
4. Organisasi pengelola diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan intensif dan membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antar pihak pengelola serta memperkuat dukungan eksternal dengan lembaga-lembaga profesional yang dapat membantu pengembangan organisasi
5. Pemerintah dan Organisasi Pengelola Desa Wisata Banjarpanepen diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan agen perjalanan wisata atau media promosi yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, R., Dewi, R. K., Darmadja, S., & Maju, U. I. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas*. 2(6), 630–637. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/erdika.v2i6.400>
- Ani Wijayanti, & Yitno Purwoko. (2022). Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan, study kasus desa wisata Karang, Trimulyo, Sleman. *Journal Of Tourism And Economic*, 5(2), 130–146. <https://doi.org/10.36594/jtec/qmv6rk38>
- Bambang, B. (2019). Identifikasi Karakteristik Pengunjung Desa Wisata di Kabupaten Banyumas. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 77. <https://doi.org/10.24252/.v9i1.10260>
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara.
- Dwidjowijoto, Nugroho, R., & Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen* (2nd ed.). BPFY-Yogyakarta.
- Hannaji, N., Bagiastra, I. K., & Kurniansah, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata di Desa Wisata Bayan. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1). <https://doi.org/10.47492/jrt.v2i1.1910>
- Lapuz, M. C. M. (2023). The Role of Local Community Empowerment in the Digital Transformation of Rural Tourism Development in the Philippines. *Technology in Society*, 74, 102308. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102308>
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2022). Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Era New Normal. *Masyarakat Indonesia*, 47(1), 91–104. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.944>
- Nugroho, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba* (1st ed.). UB Press.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/enggang.v3i2.8822>
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894>
- Setiani, M., & Sugiyanto, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Penusupan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 57–67. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.847>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Y., Wayong. (2004). *Fungsi Administrasi Negara*. Djamban.